

BAB IV

PAPARAN DATA TENTANG MAKNA DAN IMPLEMAENTASI KAFA'AH KADER PKS SULAWESI SELATAN

A. Setting Penelitian: PKS Sulawesi Selatan

PKS Sulawesi Selatan di dunia maya bisa jadi kurang populer jika dibandingkan dengan PKS Jawa Barat, PKS di Piyungan, Jogjakarta maupun PKS Surabaya. Namun, pasca peristiwa dugaan menerima dana dari Fathonah, tersangka kasus suap kuota impor daging dan isu Ketua KPK Abraham Samad pernah menjadi caleg di PKS.¹, nama DPW PKS Sulsel ramai jadi bahan pembicaraan baik di media cetak maupun dunia maya.

Ilham Arief Sirajuddin yang merupakan Calon Gubernur Sulsel yang diusung beberapa partai, termasuk PKS; mengaku ketika dipanggil KPK, ada aliran uang dari Fathanah ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel. Menurutnya, Fathanah merupakan salah satu tokoh besar di Sulsel. Ia kenal dengan Fathanah juga sudah lama. Fathanah juga kerap berhubungan dengan tokoh-tokoh PKS di Sulsel. Ia juga meminta Fathanah untuk menjembatannya dengan tokoh-tokoh PKS tersebut. Namun ia membantah jika ada aliran uang antara Fathanah ke rekening miliknya.² Kasus Fathonah hingga kini masih berjalan di pengadilan tipikor, Jakarta. Sedangkan isu Abraham, kata Ketua DPW PKS Sulsel Akmal Pashluddin hanya tercatat masuk daftar calon sementara (DCS). Pada Pemilu Legislatif 2009, nama Abraham sempat masuk dalam deretan calon sementara, namun tidak lama kemudian dia mengundurkan diri. Masih

¹ “Hidayat: Abraham Samad Pernah Jadi Caleg PKS 2004” detik.com, edisi 4 Februari 2013

² “Wali Kota Makasar: Ahmad Fathanah Kirim Uang ke DPW PKS Sulsel” republika.co.id edisi Senin 6 Mei 2013

menurut Akmal, Samad mengundurkan diri dari pencalonan legislative karena tidak setuju dengan sistem suara terbanyak untuk penetapan calon.³

Keberadaan PKS di provinsi ini sudah ada sejak partai ini bernama Partai Keadilan (PK). Ketua DPW yang pertama adalah Surya Darma yang menjabat hanya setahun. Dilanjutkan Qayyim Munarka untuk periode 1999-2004 dan Najamuddin Marahamid untuk periode 2004-2010. Sekarang ini PKS Sulsel dipimpin oleh Akmal Pashluddin yang dipercaya pada periode 2010-2015.⁴

Dengan sistem kaderisasi yang bagus, PKS Sulsel mampu mengantarkan kader terbaiknya seperti Tamsil Linrung, Andi Rakhmat dan Anis Matta melenggang ke Jakarta. Andi Rakhmat saat ini menjadi anggota DPR di komisi hukum sedangkan Anis Matta menduduki posisi puncak dalam PKS sebagai Presiden partai. Anis menggantikan Luthfi Hasan yang terseret kasus kuota impor daging.

Perkembangan PKS di Sulsel khususnya di kota Makasar cukup pesat. Ditandai dengan dua hal: *Pertama*, menjamurnya institusi pendidikan Islam seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Ma'had, Lembaga zakat dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI). Misalnya STAI al-Azhar yang dikelola oleh salah seorang kader inti PKS di Makasar. Menurut Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPW PKS Sulsel, Muhammad Taslim, Meskipun dikelola kader sendiri, tetapi STAI al-Azhar sifatnya independen dan tidak dibawah naungan PKS.⁵ *Kedua*, Masifnya aksi kolektif yang dilakukan kader-kader PKS di sana. Misalnya bakti sosial yang digelar tiap milad PKS, bulan

³ “Abraham Samad tak Pernah Jadi Caleg PKS” republika.co.id edisi 4 Februari 2013.

⁴ Lihat video “PKS sulusel dari masa ke masa” diunduh dari you tube tgl 25 Juli 2013.

⁵ Wawancara via telpn dengan Muhammad Taslim tgl 10 September 2013.

romadhan dan awal tahun baru hijriah. Bakti sosial ini didukung oleh banyaknya kader wanita PKS yang berprofesi sebagai dokter dan perawat.

B. Paparan Data Tentang Makna dan Penerapan *Kafā'ah* Bagi Kader PKS

Tesis ini fokus utamanya pada dua rumusan masalah yaitu makna *kafā'ah* bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan. Kemudian Bagaimana penerapan *kafā'ah* bagi kader inti PKS Sulsel. Sekaligus akan disertakan seperti apa dampak dari penerapan *kafā'ah* bagi kader maupun partai sebagai institusi politik. Setelah berhasil mewawancarai sekitar tujuh informan yang keseluruhannya kader inti di DPW PKS Sulsel, peneliti menjabarkan hasil wawancara sesuai dengan rumusan masalah:

1. Makna *Kafā'ah* Menurut kader Inti PKS Sulsel

Secara umum, sebagaimana pengamatan penulis, terkait dengan hasil wawancara yang penulis temukan di lapangan dengan beberapa kader inti PKS Sulsel, bahwa dari ketujuh informan yang penulis wawancarai hanya empat kader inti yang mengutarakan pemahaman mereka tentang makna *kafā'ah*, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa asumsi mereka tentang makna *kafā'ah* terdapat empat macam, yaitu *pertama*; menjadikan Agama sebagai kriteria dalam penentuan *kafā'ah*, *Kedua*; Menjadikan ekonomi dan background keluarga sebagai kriteria dalam penentuan *kafā'ah*, *Ketiga*; menjadikan pendidikan sebagai kriteria *kafā'ah* dan yang *keempat* adalah menjadikan tarbiyah sebagai kriteria dalam penentuan *kafā'ah*. Yang lebih detailnya akan penulis deskripsikan sebagai berikut;

a. Menjadikan Agama Sebagai Kriteria Sekaligus Tolak Ukur *Kafā'ah*

Sebagaimana fakta yang penulis temukan di lapangan, bahwa diantara para informan yang menyampaikan gagasan argumentasinya tentang agama sebagai tolak ukur utama adalah Muhamad Taslim. Dalam perspektif Taslim yang merupakan Sekertaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPP) DPW PKS Sulsel tersebut memandang bahwa agama merupakan titik tolak utama yang dipertimbangkan dalam sebuah perkawinan. Seperti yang dijelaskan Taslim dalam wawancaranya pada tanggal 9 September 2013 di kediamanya:

“*Kafā'ah* dalam pemilihan pasangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kalau *kafā'ah* cuma ada dalam suami saja atau sebaliknya bisa saja kehidupan rumah tangga bisa pincang. Kriteria yang pertama adalah agama, secara prinsip pernikahan merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, meskipun anaknya juga mempunyai hak untuk memilih, serta memberikan masukan kepada orang tuanya dalam memilih pasangan.”⁶

Apa yang disampaikan oleh Taslim dalam wawancaranya dengan penulis di atas tentu sangat selaras dengan ketentuan yang telah disebutkan oleh Hadits dan pendapat fiqh klasik.

b. Menjadikan Ekonomi dan Background Keluarga Sebagai Kriteria

Kafā'ah

Argumentasi yang coba dibangun oleh Muhammad Taslim nampak sangat berbeda dengan Kader inti lainnya yaitu Linda. Menurut Linda sebagai kader inti PKS memandang bahwa *kafā'ah* yang terkait dengan proses pemilihan pasangan perlu dilihat dari keadaan ekonominya dan aspek background keluarganya. Sebab ekonomi merupakan salah satu pilar

⁶ Muhammad Taslim, *Wawancara* (Makassar, 09 september 2013).

dalam keluarga yang harus dipenuhi. Sebagaimana hasil wawancara kami dengan Linda di kediamannya pada tanggal 12 september 2013. menurutnya

“*Kafā’ah* dalam proses pemilihan pasangan dilihat dari beberapa aspek, yang pertama adalah latar belakang keluarga yang kedua keadaan sosial ekonomi dan yang ketiga dari segi *fikroh*, yang ketiga ini bisa menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan sesama kader.”⁷

Hal tersebut senada juga dengan apa yang diutarakan oleh Ida Royani tentang argumentasi yang coba dibangun bahwa aspek background keluarga (*nashab*) dalam perkawinan merupakan kriteria penting yang tidak boleh diabaikan. Berikut wawancara yang telah penulis lakukan dikediamannya;

“Di dalam proses pemilihan pasangan nanti dilihat, apakah ini *sekufu’* atau tidak, antara *ikhwah* dan *akhwāt*, dari data tersebut nanti dilihat, apakah *ikhwah* ini *sekufu’* dari sisi tarbiyahnya, pendidikannya dan latarbelakang keluarganya⁸

Dari kedua argumentasi tersebut nampaknya Linda dan Ida Royani lebih realistis dalam menyampaikan alasanya. Hal itu dikarenakan tradisi masyarakat Bugis Makasar yang sampai hari ini masih berpegang teguh tentang ekonomi dan nasab merupakan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan.

c. Pendidikan Sebagai Kriteria *Kafā’ah*

Masih menurut Ida Royani bahwa selain alasan ekonomi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perkawinan, ternyata Pendidikan juga menjadi tolak ukur ketidak *kafā’ah*an seseorang. Sebab Pendidikan di era

⁷ Linda, wawancara (Makassar ,12 September 2013)

⁸ Ida royani, wawancara (Makassar, 28 Juli 2013)

modern ini merupakan suatu tolak ukur dalam perkawinan yang tidak bisa dihindari di tengah kebutuhan akan pendidikan yang begitu tinggi. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh kader inti Ida Royani, bahwa pemilihan kriteria pendidikan oleh Ida Royani dikarenakan binaannya yang di dalam *liqa* sebagian besar berasal dari kader yang berpendidikan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti;

“Di dalam proses pemilihan pasangan nanti dilihat, apakah ini *sekufu*’ atau tidak, antara *ikhwah* dan *akhwāt*, dari data tersebut nanti dilihat, apakah *ikhwah* ini *sekufu*’ dari sisi tarbiyahnya, pendidikannya dan latarbelakang keluarganya. Jadi yang maju dulu adalah pembinanya, makanya *ikhwah* dulu itu, ketika prosesnya sudah sampai kesepakatan dengan orang tua *akhwāt*, baru *ikhwah*nya memberitahu orang tuanya. Tapi si *akhwāt*nya juga akan mensosialisasikan kepada keluarganya, bahwa kondisi calon suaminya seperti ini, jadi ketika *murabbi* datang meminta, tidak akan terjadi debat yang panjang,”⁹

Alasan pendidikan sebagai tolak ukur dalam *kafā’ah* merupakan sebuah kewajaran kultural. Karena kultur masyarakat makassar merupakan kultur pendidikan.

d. Tarbiyah Sebagai Kriteria *Kafā’ah*

Selain dua kriteria antara ekonomi dan pendidikan Ida royani juga mengatakan, bahwa *sekufu*’ atau tidaknya seseorang dilihat dari tarbiyahnya, dan latar belakang keluarga. Tarbiyah yang dimaksud disini bukan “pendidikan” seperti yang dipahami orang diluar PKS, tetapi berapa lama yang bersangkutan ikut tarbiyah sebagai wadah kaderisasi PKS; dimana salah satu aktivitasnya pengajian pekanan (*liqa*’).

⁹ Ida royani, wawancara (Makassar, 28 Juli 2013)

“Di dalam proses pemilihan pasangan nanti dilihat, apakah ini *sekufu*’ atau tidak, antara *ikhwah* dan *akhwāt*, dari data tersebut nanti dilihat, apakah *ikhwah* ini *sekufu*’ dari sisi tarbiyahnya, pendidikannya dan latarbelakang keluarganya. Jadi yang maju dulu adalah pembinanya, makanya *ikhwah* dulu itu, ketika prosesnya sudah sampai kesepakatan dengan orang tua *akhwāt*, baru *ikhwah*nya memberitahu orang tuanya. Tapi si *akhwāt*nya juga akan mensosialisasikan kepada keluarganya, bahwa kondisi calon suaminya seperti ini, jadi ketika *murabbi* datang meminta, tidak akan terjadi debat yang panjang,”¹⁰

Dwi Susilarsih juga mengamini dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ida Royani bahwa aspek tarbiyah sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan. Ini disebabkan misi dakwah sebagai prioritasnya.

“Dalam memilih pasangan dulu itu karena kita yakin ketsiqohan dakwah kita bahwa pasangan kita mendukung juga kegiatan kita, karena proritas utama kami adalah dakwah. Kriteria utama kami adalah pemahamannya dalam tarbiyah (berada dalam lingkup kita), bukan masalah pekerjaan.”¹¹

Proses pemilihan pasangan dengan kriteria tarbiyah atau se-fikrah juga diamini oleh kader inti yang lain seperti Linda. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan, sebagai berikut;

“*Kafā’ah* dalam proses pemilihan pasangan dilihat dari beberapa aspek, yang pertama adalah latar belakang keluarga yang kedua keadaan sosial ekonomi dan yang ketiga dari segi *fikroh*, yang ketiga ini bisa menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan sesama kader.”¹²

Dari paparan data tentang makna kafaah para kader PKS Sulsel yang sudah penulis sajikan dan deskripsikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang telah penulis sistematisasi dalam bentuk tabel sebagai berikut;

¹⁰ Ida royani, *wawancara* (Makassar, 28 Juli 2013)

¹¹ Dwi Susilarsih, *wawancara* (Makassar, 29 Juli 2013)

¹² Linda taslim *wawancara* (Makassar, 12 September 2013)

Tabel 4.1: Makna Kafā'ah bagi Kader Inti PKS Sulsel:

No	Nama Informan	Kriteria Kafā'ah
1	Taslim	Agama sebagai kriteria utama
2	Linda	Background keluarga, keadaan ekonomi dan <i>se-fikrah</i>
3	Ida Royani	Tarbiyahnya, aspek pendidikan dan latar belakang keluarga
4	Dwi Susilarsih	Pemahamannya dalam tarbiyah, bukan masalah pekerjaan

2. Penerapan Kafā'ah Bagi Kader PKS Sulsel

Berdasar pengamatan peneliti terkait dengan Penerapan *kafā'ah* menurut kader PKS Sulsel, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *kafā'ah* tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Penerapan Pernikahan dengan sesama kader (*se-fikrah*), pernikahan dengan non kader dan implikasi pernikahan dengan kader dan non kader. Dapat penulis deskripsikan sebagai berikut;

a. Pernikahan Dengan Sesama Kader (*se-fikrah*)

Salah satu Asumsi yang beredar di luar PKS adalah terdapat kecenderungan kader PKS menikah dengan sesama kader PKS. Peneliti menanyakan fenomena tersebut kepada para informan. Sebagian informan sepakat menilai dan punya pemahaman bahwa pernikahan sesama kader itu bagian dari keberlangsungan misi dakwah, pengokohan organisasi,

supaya saling memahami peran masing-masing serta langkah awal untuk mencapai masyarakat Islami. Seperti yang diutarakan pak Irwan. Beliau menilai pernikahan sesama kader selain misi dakwah juga untuk strategi pengokohan organisasi.

“Pernikahan sesama kader adalah bagian dari kelangsungan dakwah dan bisa dipandang sebagai strategi dalam pengokohan, karena organisasi ini harus ditunjang oleh keluarga yang kokoh demi kelanjutannya.”¹³

Pandangan serupa dijelaskan dengan oleh pak Jumadil bahwa membangun rumah tangga yang bermuatan misi dakwah salah satu jalan pintasnya yaitu menikah sesama kader, meskipun kata beliau ada pilihan untuk menikah dengan non kader. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang telah penulis lakukan;

“Pemilihan pasangan dengan kriteria sesama kader (dalam artian *kafā'ah* sesama kader) bisa dibilang sesuatu yang *Awla* atau merupakan prioritas, lebih kepada doktrin di awal, bahwa ada baiknya membangun rumah tangga itu adalah membangun rumah tangga dakwah. Sehingga jalan pintasnya adalah menikah dengan kader yang sama-sama kader dakwah, meskipun pada faktanya bukan menjadi pakem, karena disana ada ruang untuk menikah diluar kader.”¹⁴

Jawaban yang cukup menarik juga diuraikan oleh ibu Susy Smita yang kini menjabat Ketua bidang Perempuan (Bidpuan) di DPW PKS Sulsel. Menurutnya menikah sesama kader merupakan langkah awal menuju masyarakat Islam yang PKS idamkan. Sebagaimana hasil wawancara yang telah penulis lakukan di lapangan;

¹³ R. Irwan Waji, wawancara (Makassar, 29 Juli 2013).

¹⁴ Jumadil Muhammad, wawancara (Makassar, 31 Juli 2013)

“Yang perlu digaris bawahi bahwa kenapa didalam PKS tetap mengatur dalam artian mengarahkan kader menikah dengan kader karena bagi kami itu merupakan langkah awal untuk mencapai masyarakat islami. Adapun tahapan-tahapan untuk menciptakan masyarakat islami dimulai dari, individu islami, membentuk keluarga islami sehingga bisa berdampak terciptanya masyarakat yang islami.”¹⁵

Dari beberapa jawaban yang disampaikan oleh para Informan di atas dapat penulis sistematisasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tabel 4.2: Pernikahan Sesama kader PKS di Sulsel:

No.	Nama Informan	Argumentasi
1	Irwan	Misi dakwah juga untuk strategi pengokohan organisasi
2	Jumadil	Sebagai jalan pintas membangun rumah tangga dakwah
3	Susy Smita	Langkah awal menuju masyarakat Islam

Namun dalam proses pencarian data ini, peneliti menemukan kader inti yang lain ingin kader binaannya menikah dengan sesama kader. Seperti Linda yang mendorong kadernya menikah dengan sesama kader demi kepentingan dakwah. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan;

“Sebagai seorang *murabbi/ah* yang mempunyai binaan, pasti dia akan mencari binaannya yang terbaik, dan diusahakan *sefikrah* artinya sama dalam memandang dakwah itu pada visi dan misinya. Saya mendorong sekali binaan-binaan saya menikah sesama kader, alasannya untuk kepentingan dakwah, karena dalam dakwah itu

¹⁵ Susy Smita, wawancara (Makassar, 29 Juli 2013)

pasangan harus saling mendukung karena basic dalam dakwah itu adalah keluarga.”¹⁶

Pandangan yang kurang lebih sama diutarakan juga oleh bapak Irwan dan bapak Jumadil. Dalam perspektif Irwan menikah sesama kader berfungsi untuk pengokohan dalam struktur organisasi PKS. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan;

“Kami sebagai *murabbi/ah* sangat menganjurkan menikah sesama kader, karena ada jaminan dalam pengokohan dalam struktur organisasi ini”¹⁷

Jumadil pun juga berargumen kalau di internal PKS masih banyak kader yang lebih baik buat apa mencari non kader. Di internal, tidak ada istilah pacaran, jadi menurut bapak Jumadil, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada *murabbinya* ketika dulu menikah dengan istrinya. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Jumadil;

“Kalau memang di internal kami ada yang lebih baik, ngapain juga memilih diluar kader. Kita diinternal kader tidak ada pacaran sehingga untuk memudahkan menuju akses tersebut dengan menghubungi Pembina(*murabbi*), dan kami bisa merasa tenang dan menjamin kalau dipilihkan oleh Pembina, dibandingkan pilihan orang tua, karena mereka satu sisi yang kebetulan tidak sepaham dengan kita.”¹⁸

b. Pernikahan Dengan Non Kader

Pernikahan sesama kader atau dengan non kader tentunya ada peran seorang *murabbi/ah*. Namun sejauh mana peran para *murabbi/ah* juga peneliti telusuri. Terkait hal ini para informan memberi dua model jawaban. *Pertama*, dulu ketika era Partai keadilan, peran *murabbi/ah*

¹⁶ Linda taslim wawancara (Makassar ,12 September 2013)

¹⁷ R. Irwan Waji, wawancara (Makassar, 29 Juli 2013).

¹⁸ Jumadil Muhammad, wawancara (Makassar, 31 Juli 2013)

dominan, tetapi sekarang tidak begitu dominan khususnya ketika ada kader yang ingin menikah dengan non kader. *Kedua*, peran *murabbi/ah* yang sifatnya kondisional. Seperti yang nanti diutarakan Taslim. Tidak masalah seorang kader PKS khususnya para akhwatnya menikah dengan non kader asal yang hanif. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ida Royani dalam wawancaranya.

“Dulu *murabbi/ah* yang dominan, orangtua memasrahkan kepada *murabbi/ah*, tapi sekarang mungkin ada pergeseran nilai, diantaranya ada beberapa *akhwāt* kemungkinan rasa malunya sudah berkurang, dulu pada masa kami, rasa malu *akhwāt-akhwāt* sangat tinggi, Jadi untuk saat ini kita sebagai Pembina, yang kita pikirkan bagaimana *akhwāt* ini menikah, walaupun itu bukan kader yang penting dia laki-laki yang hanif. Dan yang lebih penting, dari awal harus ada perjanjian, bahwa suaminya ini mengetahui kalau calon istrinya adalah kader PKS, sehingga tidak ada pelarangan untuk mengikuti tarbiyah atau kegiatan-kegiatan PKS setelah menikah,”¹⁹

Kader inti PKS lainnya seperti Susi Smita juga menegaskan bahwa peran *murabbi/ah* hanya mengarahkan dan tidak memaksa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Susi Smita dalam wawancara yang penulis lakukan di kediamannya;

“*murabbi/ah* akan tetap berusaha untuk mengarahkan serta membantu kader untuk menikah sesama kader sehingga ada kesamaan fikroh, tetapi ini bukan merupakan paksaan atau harga mati”²⁰

Pada aras yang sama peran *murabbi/ah* dalam proses pernikahan seorang kader menjadi kriteria yang harus dipertimbangkan, dalam kaitan ini Dwi Susilarsih mengutarakan hal serupa, bahwa seorang *murabbi/ah* hanya

¹⁹ Ida royani, *wawancara* (Makassar, 28 Juli 2013)

²⁰ Susy Smita, *wawancara* (Makassar, 29 Juli 2013)

mengarahkan dan tidak ada paksaan harus menikah sesama kader karena tergantung tingkat pemahaman kader dan juga faktor jodoh di tangan Allah SWT. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan;

“*Murabbi/ah* sangat mendorong kadernya untuk menikah sesama kader, tapi tidak serta merta ini berjalan mulus, kembali kepada tingkat pemahaman kader tersebut. Ketika ada kader menikah diluar kader bagi kami tidak menjadi masalah, karena *murabbi/ah* cuma mengarahkan saja, dan yang kita pahami bahwa jodoh itu Allah yang tentukan. Mungkin ini yang terbaik bagi dia.”²¹

Kader inti PKS, Muhammad Taslim punya pandangan kondisional alias moderat dibanding istrinya, Linda yang ingin binaannya menikah sesama kader saja. Muhammad Taslim memiliki dua sudut pandang terkait pernikahan sesama kader yang konteksnya memperkuat misi dakwah dan menikah dengan non kader dengan misi ekspansi dakwah. Menikah dengan sesama kader mengharuskan *se-fikrah*, sedangkan dengan non kader asal punya suatu kriteria-kriteria dasar dalam Islam. Hal tersebut sebagaimana Muhammad Taslim sampaikan dalam wawancaranya;

“Memperkuat dakwah dalam naungan *sefikrah* itu memang cara yang baik tapi tergantung konteksnya, kalau memang konteksnya ekspansi maka ini bukan menguatkan tapi memperluas dakwah. Bagi saya kalau konteksnya perluasan, maka menikahkan dengan non kader merupakan salah satu cara yang baik, meskipun ada risikonya, tapi orang yang berdakwah dengan resiko tinggi pahalanya juga besar, dan di lapangan kita melihat banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai potensi dan dipandang justru simpati dengan pks karena anaknya menikah dengan kader PKS. Kalau saya yang pertama sebagai satu kategori sangat menganjurkan, tentu pertama mencari pasangan diinternal yang *sefikrah* yang sudah siap menikah, karena bagaimanapun juga

²¹ Dwi Susilarsih, wawancara (Makassar, 29 Juli 2013)

ketika saya mempunyai binaan laki-laki tentu saya carikan binaan yang sudah terbina, karena banyak memang *akhwāt* yang belum menikah, dan yang kedua jika tidak ada yang cocok bagi dia, maka tidak masalah menikah dengan non kader, tapi dengan catatan punya suatu kriteria-kriteria dasar dalam Islam”²²

Para informan yang rata-rata sebagai *murabbi/ah* dan mempunyai binaan mengatakan tidak masalah jika ada kader menikah dengan orang di luar jamaah, asal tidak menghalangi pasangannya ikut kegiatan-kegiatan dakwah di PKS. Seperti yang diutarakan oleh Linda , Dwi susilarsih dan Susi Smita di lapangan;

Menurut Linda “Ada *akhwāt* menerima pinangan laki-laki yang bukan kader itu dengan satu syarat tidak menghalanginya nanti dalam kegiatan-kegiatan dakwah di tarbiyah PKS, walaupun nanti dalam pelaksanaannya merupakan tanggungjawab istri untuk mentarbiyahkan suaminya, tapi kita juga memahami bahwa hidayah itu dari Allah, jadi ini cuma upaya saja.”²³

Menurut Dwi Sularsih “Binaan yang Menikah diluar kader tidak jadi masalah yang penting dia hanif dan tidak menghalanginya mengikuti kegiatan-kegiatan kepartaian misalnya, bahkan lebih bagus lagi kalau dia bisa merekrut orang lain masuk PKS.”²⁴

Menurut Susi Smita “Ketika ada kader menikah dengan non kader tidak menjadi masalah, dengan syarat pasangannya yang bukan kader tidak menghalangi pasangannya dalam kegiatan-kegiatan dakwah PKS. Kita menghindari hal-hal mendoktrin, dan kader yang akan menikah dengan non kader tetap konsultasi dengan murabbi/ahnya. Apalagi sekarang banyak akhwat yang belum menikah.”²⁵

Dari paparan data yang disampaikan oleh para informan di atas dapat penuliis simpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

²² Muhammad Taslim, *Wawancara* (Makassar, 09 september 2013).

²³ Linda taslim *wawancara* (Makassar ,12 September 2013)

²⁴ Dwi Susilarsih, *wawancara* (Makassar, 29 Juli 2013)

²⁵ Susy Smita, *wawancara* (Makassar, 29 Juli 2013)

Tabel 4.3: jika ada kader menikah dengan orang di luar PKS:

No	Nama Informan	Argumentasi
1	Linda	Asal tidak melarang pasangannya aktif di kegiatan tarbiyah/PKS
2	Dwi susilarsis	Yang penting Hanif dan tidak melarang pasangan ikut kegiatan kepartaian
3	Susi asmiwati	Kader yang menikah dengan orang diluar PKS, tetap berkonsultasi dengan muroobi. Meminta pasangan yang bukan kader tidak melarang untuk aktif di kegiatan partai

Apakah jika seorang kader PKS menikah dengan non kader akan mendapatkan perlakuan khusus bahkan bisa juga kena sanksi oleh *murabbi/ahnya*? Para informan dengan tegas tidak ada sanksi karena menikah itu hak pribadi. Muhammad Taslim menjelaskan sebagai berikut:

“Sanksi tidak ada, karena kita memahami bahwa pada prinsipnya itu kewajiban orang tua, kami cuma mengarahkan, sehingga jika ada kader ingin menikah pasti kami kordinasikan dulu dengan orang tuanya. Ketika orang tua menyerahkan kepada anaknya, baru kami sebagai *murabbi/ah* mencari pasangan untuk dia. Menikah itu hak pribadi dan kewajiban struktur cuma mengarahkan.”²⁶

Darimana anjuran menikahkan sesama kader ini, Apakah tertera di AD/ART ataukah muncul dari *murabbi/ah*? Seorang informan menjawab

²⁶ Muhammad Taslim, Wawancara (Makassar, 09 september 2013).

hal ini tidak ada di dalam AD/ART, melainkan inisiatif para *murabbi/ah*.

Seperti yang dikatakan oleh Dwi Susilarsih:

“Ini tidak ada dalam AD/ART, kemungkinan ini inisiatif-inisiatif *murabbi/ah* untuk mencari yang terbaik buat binaannya karena pengaruhnya nanti ke dakwah.”²⁷

Hal senada jga diungkapkan Irwan Waji dalam wawancaranya dengan penulis di lapangan;

“Tidak ada AD/ART yang mengatur ini. Kita sebagai *murabbi/ah* menganggap bahwa itu merupakan cara berpikir kita dalam melihat perjuangan serta keterlibatan kita dalam organisasi ini”²⁸

Bahkan Muhammad Taslim juga menyampaikan jawaban yang sama dengan Dwi Sularsih dan Irwan Waji. Sebagaimana dalam wawancaranya;

“Ini tidak ada di AD/ART, cuma pertimbangan kemaslahatan saja.”²⁹

Dari beberapa inisiatif para *murabbi/ah* sempat dulunya memunculkan sebuah *lajnah* bernama tim *munākahat*. Namun keberadaan *lajnah* tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan;

“Dulu memang ada *lajnah munākahat* di internal, tapi sekarang sudah tidak ada, apalagi menikah itu urusan luas, apalagi saya kira ini merupakan kebijakan global dalam *jamā’ah* yang adakalanya meluas tapi bukan berubah ya, dan dituntut untuk berintraksi dengan dunia luar secara terbuka, meskipun ajaran terbuka itu sudah ada”³⁰

²⁷ Dwi Susilarsih, *wawancara* (Makassar, 29 Juli 2013)

²⁸ R. Irwan Waji, *wawancara* (Makassar, 29 Juli 2013).

²⁹ Muhammad Taslim, *Wawancara* (Makassar, 09 september 2013).

³⁰ Jumadil Muhammad, *wawancara* (Makassar, 31 Juli 2013)

Dari beberapa uraian data yang disampaikan oleh para informan di atas dapat peneliti sistematisasikan dalam benntuk tabel sebagai berikut;

Tabel 4.4: Anjuran menikah sesama kader, Aturan AD/ART atau Inisiatif *Murabbi/ah?*

No	Nama Informan	Argumentasi
1	Dwi susilarsis	Tidak ada aturan khusus di AD/ART, melainkan inisitif murabbi/ah
2	Irwan	Tidak ada aturan di AD/ART yang mengatur ini
3	Muhammad. Taslim	Tidak ada di AD/ART, Cuma pertimbangan kemaslahatan saja

c. Implikasi Pernikahan Dengan Sesama Kader dan Non Kader

Sejatinya apa yang kita lakukan termasuk buah dari sebuah tradisi akan membawa dampak bagi pelakunya. Dalam hal ini penerapan *kafā'ah* di kalangan PKS Sulsel sedikit banyak ada dampaknya terutama bagi kader dan organisasi. Diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Linda;

“Dampaknya sangat berpengaruh signifikan, ketika ada masalah politik dia bisa mengkomunikasikan dengan keluarga masing-masing, sehingga bisa kerja sama yang baik karena sama-sama memahami tugas sebagai kader. Suara PKS memang ada pengaruhnya cuma tidak signifikan, tapi kita harus memahami bahwa dakwah bukan hanya sampai dalam urusan politik saja, jadi ketika dia bisa mengkomunikasikannya dengan yang bukan kader atau eksternal berarti dia sudah menjalankan tugasnya sebagai kader. Dukungan suami istri sangat mempengaruhi kerja-kerjanya di masyarakat.”³¹

³¹ Linda, wawancara (Makassar ,12 September 2013)

Informan seperti Dwi Sularsih yang merupakan ketua Bidang Perempuan Dewan Pengurus Daerah (DPD) kota Makassar mengatakan kepada peneliti bahwa pernikahan sesama kader membawa efek kesolidan. Beliau menuturkan:

“Dampak politik bisa lebih solid, dan kita bisa kuat di keluarga masing-masing, sehingga ketika sama-sama kader ketika ada masalah dikepartaian tidak membutuhkan waktu untuk menjelaskan lagi..”³²

Penerapan kafā’ah di kalangan kader inti membawa dampak bagi kesolidan khususnya di level kekuatan mesin politik PKS sehingga membantu kemenangan-kemenangan dalam pilkada. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Taslim:

“Dampak politiknya solid, dari segi mobilisasi itu mudah, dalam kemenangan-kemenangan pilkada atau legislatif mereka solid, karena satu suara. Sedangkan dalam politik kan kita butuh suara. Yang kedua mereka solid dalam bekerja, meskipun mereka bukan caleg misalnya tapi dia rela bekerja untuk memenangkan kader PKS. Dan yang bisa melakukan kerja-kerja yang tanpa biaya hanya kader-kader militan seperti ini.”³³

Selain membawa dampak bagi kesolidan khususnya di level kekuatan mesin politik PKS sehingga membantu kemenangan-kemenangan dalam pilkada, juga bisa menjadi penyemangat bagi kader, sehingga menjadi kader yang kuat dan tangguh karena dukungan dari pasangannya, sebagaimana yang diutarakan Ida Royani:

“semangat dakwahnya menjadi kuat karena pasangannya mendukung aktivitasnya di PKS. Itulah mengapa kami menikahkan kader dengan kader”³⁴

³² Dwi Susilarsih, *wawancara* (Makassar, 29 Juli 2013)

³³ Muhammad Taslim, *Wawancara* (Makassar, 09 september 2013).

³⁴ Ida royani, *wawancara* (Makassar, 28 Juli 2013)

Kader inti Jumadil ketika peneliti wawancarai memberi jawaban bahwa dampak pernikahan sesama kader atau nikah dengan di luar kader punya efek kepada raihan suara dan produktifitas dakwah di PKS. Bagi beliau itu sesuatu hal yang relatif.

“Kalau dikaitkan dengan suara, ini relatif ya, tidak bisa juga dibilang kalau menikah di luar kader bisa berdampak positif, begitupun sebaliknya menikah dengan sesama kader juga bisa terkesan eksklusif, karena pada faktanya ada yang sesama kader jadi produktif dakwahnya, tapi ada juga yang tidak berbuat apa-apa.”³⁵

Dari beberapa uraian yang disampaikan oleh para informan di atas, penulis telah berhasil sistematisasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tabel 4.5: Implikasi Pernikahan Dengan Kader :

No	Nama Informan	Implikasi
1	Linda	Dampak ke perolehan suara PKS memang ada pengaruhnya cuma tidak signifikan
2	Dwi Suliarsis	Pernikahan sesama kader membawa efek kesolidan,
3	Taslim	Timbul kesolidan khususnya di level kekuatan mesin politik PKS sehingga membantu kemenangan-pemenangan dalam pilkada
4	Jumadil	Menikah di luar kader bisa berdampak positif, begitupun sebaliknya menikah dengan sesama kader juga bisa terkesan eksklusif.
5	Ida rohyani	semangat dakwahnya menjadi kuat karena pasangannya mendukung

³⁵ Jumadil Muhammad, *wawancara* (Makassar, 31 Juli 2013)

		aktivitasnya di PKS. Itulah mengapa kami menikahkan kader dengan kader.
--	--	---

Informan seperti Dwi Sularsih mengatakan kepada peneliti bahwa pernikahan dengan non kader membuat binaannya menjelaskan kepada pasangannya informasi-informasi yang tidak benar yang menyangkut PKS.

“Seperti saya yang mempunyai binaan yang nikah bukan kader, tentu dia harus menjelaskan lagi kepada pasangannya ketika ada informasi yang kurang jelas karena kita juga tidak perlu menelan mentah-mentah informasi-informasi tersebut. akan tetapi berbeda ketika pasangan sesama kader.”³⁶

Menurut Ida rohyani yang merupakan mantan tim *munākahat* kader PKS Sulsel mempunyai jawaban sedikit berbeda dalam hal dampak pernikahan dengan non kader. Dampak lebih dirasakan pada kalangan akhwat PKS yang mana semangat dakwahnya berguguran karena pasangannya tidak mendukung aktivitasnya di PKS.

“Pengalaman dilapangan ketika akhwāt menikah diluar kader, semangatnya berguguran, alasan utamanya karena suami yang tidak mendukung. Tapi kalau kader dengan kader itu akan saling mendukung, itu memang tujuan awal kami kenapa menikahkan kader dengan kader.”³⁷

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Muhammad Taslim yang merupakan kader inti PKS, punya pandangan kondisional tentang pernikahan kader dengan non kader, yaitu jika konteksnya misi ekspansi dakwah maka menikah dengan non kader merupakan salahsatu solusinya,

³⁶ Dwi Susilarsih, *wawancara* (Makassar, 29 Juli 2013)

³⁷ Ida royani, *wawancara* (Makassar, 28 Juli 2013)

dengan syarat non kader tersebut mempunyai suatu kriteria-kriteria dasar dalam Islam.

“Memperkuat dakwah dalam naungan *sefikrah* itu memang cara yang baik tapi tergantung konteksnya, kalau memang konteksnya ekspansi maka ini bukan menguatkan tapi memperluas dakwah. Bagi saya kalau konteksnya perluasan, maka menikahkan dengan non kader merupakan salah satu cara yang baik, meskipun ada resikonya, tapi orang yang berdakwah dengan resiko tinggi pahalanya juga besar”³⁸

Dari beberapa uraian yang disampaikan oleh para informan di atas, penulis telah berhasil mensistematisasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tabel 4.6: Dampak Pernikahan Dengan Non Kader :

No	Nama Informan	Implikasi
1	Dwi Suliarsis	Menikah dengan non kader membuat binaannya menjelaskan kepada pasangannya informasi-informasi yang tidak benar yang menyangkut PKS
2	Ida rohyani	Dampak lebih dirasakan pada kalangan akhwat PKS, jika menikah dengan non kader, semangat dakwahnya berguguran karena pasangannya tidak mendukung aktivitasnya di PKS. Itulah mengapa kami menikahkan kader dengan kaderkader membuat binaannya menjelaskan kepada

³⁸ Muhammad Taslim, Wawancara (Bone, 09 september 2013).

		pasangannya informasi-informasi yang tidak benar yang menyangkut PKS
3	Muhammad Taslim	kalau memang konteksnya ekspansi maka ini bukan menguatkan tapi memperluas dakwah. Bagi saya kalau konteksnya perluasan, maka menikahkan dengan non kader merupakan salah satu cara yang baik, meskipun ada resikonya, tapi orang yang berdakwah dengan resiko tinggi pahalanya juga besar